



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Transportasi Prioritas Anies 2017-2022

JAKARTA - Pembangunan transportasi massal menjadi program prioritas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno selama lima tahun ke depan (2017-2022).

Kebijakan itu diungkapkan dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2020 yang digelar di DPRD DKI Jakarta kemarin.

Anies mengatakan, RPJMD hakikatnya merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersfat indikator.

"Kami juga telah merumuskan 23 rencana kerja dalam RPJMD yang diharapkan menjawab kebutuhan paling mendasar dalam masyarakat, kemudian dijadikan program prioritas," ujar Anies kemarin.

Salah satu program prioritas di antaranya mendorong peningkatan pelayanan transportasi publik. Pembangunan transportasi ini melalui peningkatan angkutan umum berbasis jalan dan air dengan skema *One Karcis One Trip* (OK Otrip), mengoperasikan mass rapid transit (MRT) fase I (Tchak Bulus-Bundaran HI) dan membangun MRT fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan), mengoperasikan *light rail transit* (LRT) fase I (Kelapa Gading-Velodrom).

Kemudian membangun LRT fase II, mendorong pembangunan *elevated loopline/circular line*, mengoperasikan jalan berbayar secara elektronik/*electronic road pricing* (ERP) pada empat koridor jalan arteri, membangun *flyover* dan *underpass*, serta membangun jalur pedestrian dan *park and ride*.

"Kami juga mengembangkan *transit oriented development* (TOD)

pada perpotongan dua moda atau lebih angkutan massal. Sebagai prioritas akan dikembangkan TOD Dukuh Atas mengiringi kawasan ini akan dilalui berbagai moda transportasi umum," ungkap Anies.

Untuk mewujudkan program prioritas tentu tidak bisa dilaksanakan oleh Pemprov DKI sendiri, melainkan perlu berkolaborasi baik dengan pemerintah pusat maupun pemkab/pemkot dan seluruh potensi masyarakat, baik dari kalangan akademisi, dunia usaha maupun komunitas.

"Kami tidak hanya menggunakan pendekatan pembangunan fisik, pendekatan masyarakat lebih penting. Tak sekadar berpartisipasi, keterlibatan masyarakat secara kolaboratif diharapkan menjadi motor penggerak utama pembangunan Jakarta menuju kota yang maju dan bahagia warganya," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah optimistis pembangunan transportasi selama lima tahun ke depan dapat mengurangi kemacetan dengan hitungan rata-rata kecepatan sekitar 35 km/jam. Dia memprediksi pembangunan transportasi terwujud di tahun ketiga atau 2020.

Saat ini Pemprov DKI terus berupaya mengintegrasikan Bus Transjakarta dengan KRL Commuter Line, termasuk pembiayaannya, sambil menunggu pembangunan moda transportasi berbasis rel

seperti MRT dan LRT serta fasilitas pendukung lainnya yang tertuang dalam konsep pola transportasi makro (PTM).

"Kami akan mengurangi biaya operasional transportasi yang saat ini berkisar 30-40% menjadi 10% melalui program OK Otrip," kata Andri.

Pengamat transportasi Unika Soegija-pranoto Ujoko Setidjawanono menuturkan, pengguna angkutan umum sesuai dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek sekitar 40% (2019) dan 60% (2030). Maka itu dibangunlah LRT Jabodebek, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta.

Upaya lain yang masih bisa dilakukan adalah dengan memperpanjang layanan Transjakarta hingga kawasan Bodetabek. Lalu memberikan layanan angkutan umum yang tersedia di seluruh kawasan perumahan di Bodetabek.

Si bima setiyadi



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

Transportasi Prioritas Anies 2017-2022

KUPAS RPJMD DKI

Pembangunan di DKI Jakarta pada 2017-2022 difokuskan pada pengembangan infrastruktur, pembangunan manusia, peningkatan integritas aparatur, dan pengembangan kota lestari.

- Perkiraan RAPBD Perubahan 2018 Rp66,43 triliun
- Proyeksi APBD 2022 Rp115,35 triliun

PENDAPATAN DAERAH RP101,47 TRILIUN YANG TERDIRI ATAS:

- PAD Rp70,27 triliun (Pajak Daerah Rp61,63 triliun, Retribusi Daerah Rp686,27 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp1,17 triliun, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp6,77 triliun)
- Dana Perimbangan Rp31,18 triliun
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp15,73 miliar
- Belanja Daerah Rp100,56 triliun
- Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp13,69 triliun
- Peneluaran Pembiayaan Daerah Rp5,29 triliun

Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

- Peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja melalui upaya menjadikan One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) di 44 kecamatan sebagai penggerak utama wirausaha warga; mewujudkan 200.000 bewirausaha dan 200.000 lapangan kerja.
- One Stop City Business melalui pengembangan pelayanan one stop bagi perizinan dan nonperizinan serta mengaktifkan mal pelayanan publik.
- Pembangunan transportasi melalui pengintegrasian angkutan berbasis jalan dan air melalui skema One Cards One Trip (OK Otrip); mengoperasikan MRT fase I (Lobak Bulus - Bundaran HI) dan membangun MRT fase II (Bundaran HI - Kampung Bandan); Mengoperasikan LRT fase I (Kelapa Sadang - Velodrom) dan membangun LRT fase II; mengoperasikan sistem jalan berbayar secara elektronik (ERP) pada 4 koridor jalan arteri.
- Pengembangan Transit Oriented Development (TOD).
- Penyediaan perumahan melalui fasilitasi 250.000 warga Jakarta yang memenuhi kriteria/persyaratan memiliki rumah sendiri melalui skema DP Nol Rupiah dan pendirian BLUD Perumahan Rakyat.

KORAN SINDO

- Pengentusan kemiskinan yakni menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 1% dan 3,78% pada 2017 menjadi 2,78% pada 2022 melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

- Peningkatan kualitas pendidikan baik di sekolah, madrasah, pesantren maupun satuan pendidikan nonformal lainnya termasuk menjerah tembak guru dan tenaga pendidik, pemberian KJP Plus, tidak ada gedung sekolah rusak.

- Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan dalam rangka pemenuhan 100% Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal (Universal Health Coverage) dan mengembangkan layanan One Kelurahan Outstanding Care (OK OCARE).